BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Dinas Pendidikan Kota Bandung

Sejarah pembentukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terjadi bersamaan dengan digulirkannya Era Otonomi daerah respon terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berubah dari sistem pemerintahan yang sentra listrik ke pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Wilayah NKRI dibagi dalam daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota yang bersifat OTONOM, artinya daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat,dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, nemun berdasarkan pasal 9 ayat 2, kewajiban tersebut tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Karena itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 60, 61, dan 62 maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk perangkat daerah yang disebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pendidikan. Dinas ini

dipimpin oleh seorang kepala dinas pendidikan yang diangkat oleh Gubernur Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sebelum di berlakukannya otonomi daerah, dinas pendidikan provinsi jawa barat, secara administrasi masih bersifat vertikal dengan nama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. namun seiring dengan perkembangan sesuai tuntutan reformasi maka berdasarkan UndangUndang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, menuntut beberapa perubahan baru dan dan penyesuaian dan pengelolaan daerah otonom, salah satunya dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsisebagai daerah otonom serta peraturan daerah provinsi jawa barat No 15 Tahun 2000 Tanggal 12 Desember 2000 tentang daerah dinas provinsi jawa barat kemudian di sesuaikan kembali dengan ditetapkan dengan keputusan gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dan unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dinas pendidikan provinsi jawa barat merupakan penggabungan dari kantor Wilayah Depertemen Pendidikan Nasional jawa barat yang berkantor di jalan Dr.Radjiman No 06 Bandung dengan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Barat yang berkantor di Jalan Banda No. 28 Bandung. Sesuai dengan kesepakatan maka Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Di Tetapkan Di Jalan Dr.Radjiman No.06 Bandung. Pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan sebuah daerah, karena salah satu parameter untuk mengukur kemajuan sebuah negara adalah pendidikan, dengan pendidikan di harapkan akan melahirkan manusia yang berkualitas dan berperadaban, di sini peran

pemerintah sangat signifikan untuk merubah wajah pendidikan. Mengingat sangat pentingnya peranan pendidikan maka pemerintah mendirikan instansi Dinas Pendidikan di setiap daerah yang pengelolaannya dibawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (DISDIK JABAR) adalah sebuah instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa barat. DISDIK JABAR bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang pendidikan dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu DISDIK JABAR mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pendidikan.
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan.
c. Pembinaan manajemen dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, dikmenjur, pendidikan menengah umum dan pendidikan tinggi, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah serta UPTD.
d. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas.

1.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

1.1.1.1 Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Pendidikan Jawa Barat adalah Akserasi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Cerdas dan Berakhlak Mulia Serta Menguasai Ilmu

Pengetahuan, Berdaya Saing Menuju Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera.

1.1.1.2 Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Berikut adalah Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu.

1. Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Kelembagaan Dinas Pendidikan Mewujudkan Tata Kelola Yang Prima, Akuntabel Guna Tercapainya *Good Governance* Bidang Pendidikan.
2. Meningkatkan Upaya-upaya Pemerataan Dan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Serta Relevansi Pendidikan Secara Efisien Dan Efektif.

(Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)

1.1.2 Moto Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dikarenakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan suatu instansi yang berada dibawah naungan Provinsi Jawa Barat, maka moto Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sama seperti halnya moto Jawa Barat yaitu, Gemah Ripah Repeh Rapih, yang merupakan sebuah frasa berasal dari bahasa Sunda. Kata gemah-ripah dan repeh-rapih merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut :

- Gemah-ripah : subur makmur, cukup sandang dan pangan.
- Repeh-rapih : rukun dan damai atau aman sentosa.

Arti bebas dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai.

(Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

1.1.3 Logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Logo merupakan suatu identitas dari suatu lembaga ataupun organisasi adapun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1

Logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2013

Logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

1.1.3.1 Arti Lambang

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam logo atau lambang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini ialah :

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.

8. Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan damdam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur.

1.1.3.2 Arti Warna

Pada lambang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat didapati beberapa warna yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warnawarna ini memiliki arti khusus.

1. Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.
2. Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan.
3. Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian.
4. Merah artinya melambangkan keberanian.
5. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

1.2 Sejarah Divisi (Humas) Dinas Pendidikan Kota bandung

Sejarah Divisi Subbagian Kepegawaian Umum (Humas) Divisi Subbag Kepegawaian dan Umum lahir seiring dirubahnya nama Kanwil Depdikbud menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berada dibawah Bagian Sekretaris, Sub Bagian Kepegawaian Umum mempunyai sub dibawahnya yaitu Humas & Hukum,

Persuratan/Kearsipan, Kepegawaian, Poliklinik, Koperasi, Kendaraan yang masing-masing sub bagian tersebut memiliki koordinator tersendiri didalamnya.

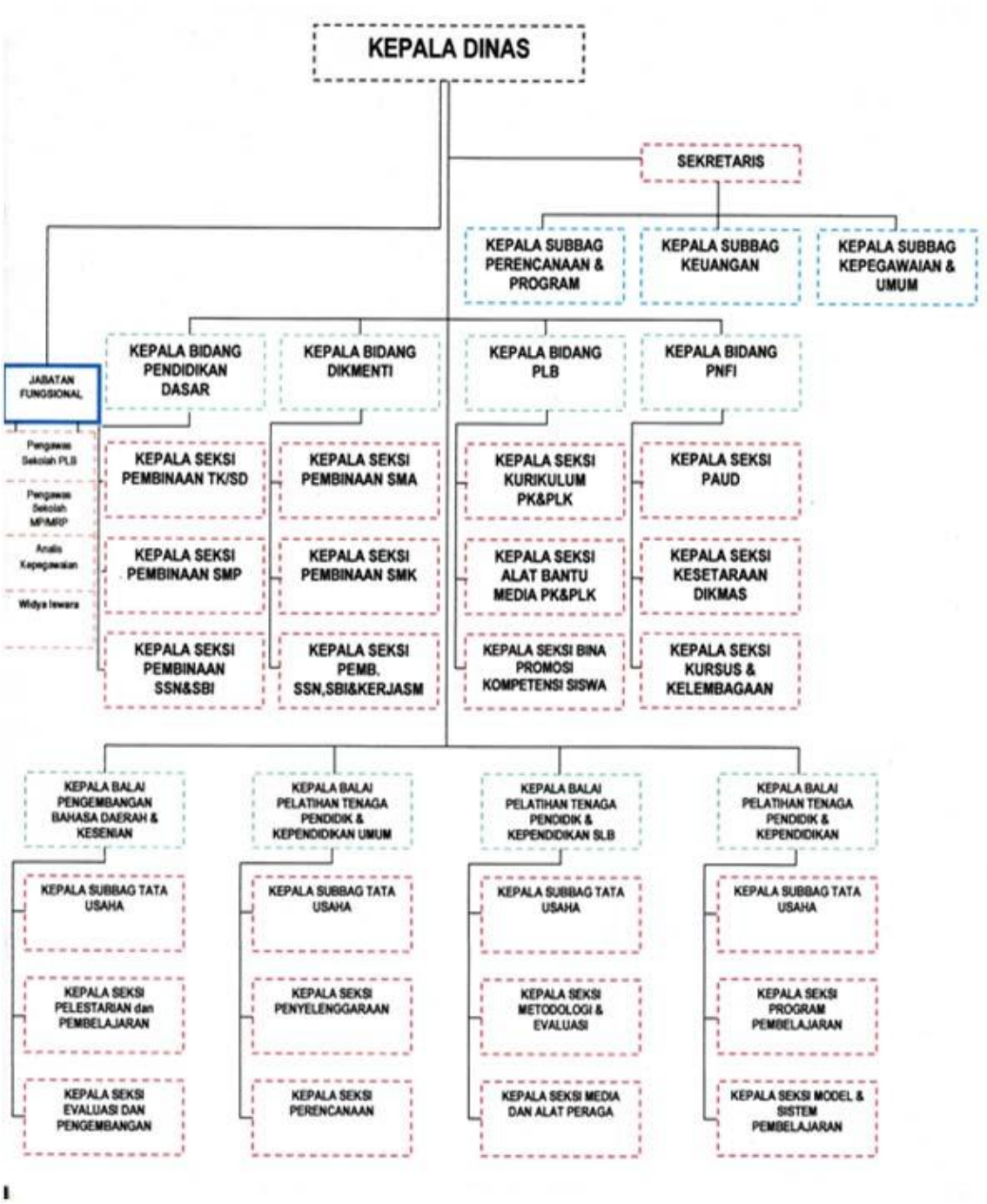
Semenjak melakukan kerja praktek di Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat, Penulis diberi kesempatan untuk melakukan kerja praktek di bagian Humas yang berada di bawah Divisi Subbag Kepegawaian dan Umum.

Berbeda dengan perusahaan swasta pada umumnya, Humas yang ada di Instansi masih bersifat tidak melembaga atau dikenal dengan istilah Method Of Communication, yang menjadikan tugas seorang Humas di sebuah instansi tidak begitu diunggulkan dalam menjaga sebuah citra instansi terkait atau menjalankan fungsi kehumasan.

Dengan adanya hal tersebut, menjadikan sub divisi Humas ini tidak begitu terorganisir dalam menjalankan tugas kehumasannya. Akan tetapi, pada dasarnya kegiatan seorang Humas yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat di jelaskan sebagai berikut :

1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung/Instansi

Gambar 1.2



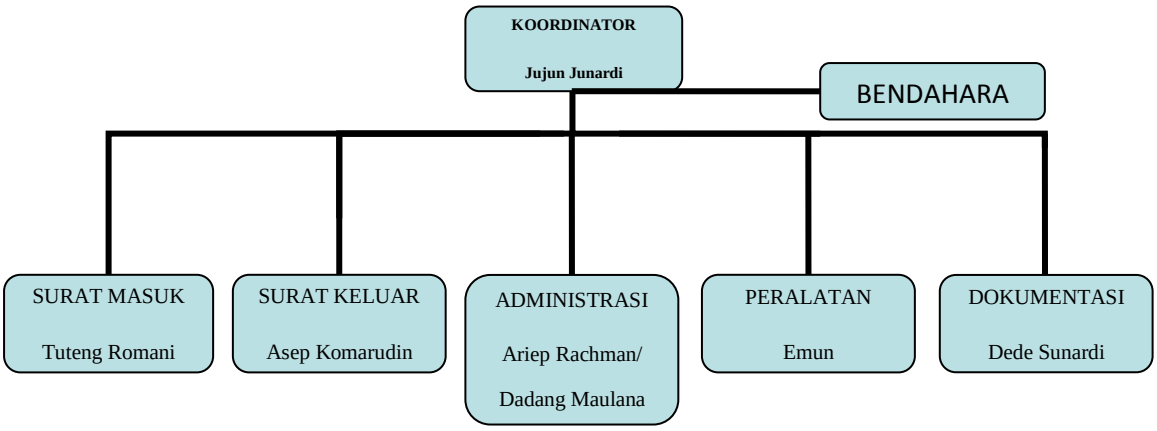
Sumber : Website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2013

Dinas pendidikan jawa barat di pimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi sekretaris,jabatan fungsional. Kepala bidang pendidikan dasar,kepala bidang dikmenti,kepala bidang PLB,kepala bidang PNFI,kemudian sekretari membawahi kepala subbag kepegawaian dan umum. Sub bagian kepegawaian umum mempunyai sub dibawahnya yaitu persuratan atau kearsipan,kepegawaian,poliklinik,koperai,kendaraan,humas dan hukum dimana penulis diberikan kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan yang masing sub bagian tersebut memiliki kodinator sendiri didalamnya.

1.4 Struktur Divisi atau Humas

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Divisi Humas Dinas Pendidikan Kota Bandung



Sumber : Website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2013

1.5 *Job Description* Dinas Pendidikan Jawa Barat

Tugas Poko dinas adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, dekonstrasi dan tugas pembantuan bidang urusan pendidikan. Adapun tugas-tugas dari setiap tugas atau jabatan,antara lain sebagai berikut :

A. Kepala dinas mempunyai tugas poko merumuskan,menetapkan,memimpin mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas poko dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD.
B. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kordinasi perencanaan dan program, penyusunan program dan pengelolaan keuangan,kepegawaian dan umum.
C. Subbagian perencanaan dan program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.
D. Subbagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan bagian adminitrasi di lingkungan dinas.
E. Subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan bagian administrasi kepegawaian,ketatalaksanaan umun dan umum dan perlengkapan.
F. Bidang pendidikan dasar mempunyai tugas pokok menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan operasioanal dan fasilitas pembinaan TK dan SD.
G. Seksi pembinaan TK dan SD mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitas pendidikan dasar.

H. Seksi pembinaan SMP mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMP.

I. Seksi pembinaan SSN dan SBI mempunyai tugas pokok menysun barang kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SSN dan SBI.

J. Bidang pendidikan menengah dan tinggi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan menengah dan tinggi.

K. Seksi pembinaan SMA mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMA.

L. Seksi pembinaan SMK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMK.

M. Seksi pembinaan SSN,SBI dan kerjasama DIKTI mempunhai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasinal dan fasilitasi pembinaan SSN,SBI dan kerjasama DIKTI.

N. Bidang pendidikan luar biasa mempunyai tugas pokok menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan luar biasa.

O. Seksi kurikulum PK dan PLK mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan operasional dan fasilitasi kurikulum PK dan PLK.

P. Seksi alat bantu media PK dan PLK mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan operasional dan fasilitasi alat bantu media PK dan PLK.

Q. Seksi Bina promosi kompetensi siswa mempunyai tugas pokok menyusun bahan operasional dan fasilitasi Bina promosi kompetensi siswa.

R. Bidang pendidikan nonformal dan informal mempunyai tugas okok menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan nonformal dan informal.

S. Seksi PAUD mempunyai tugas pokok menyusun bahan operasional dan fasilitasi pendidikan anak usia dini.

T. Seksi kesetaraan dan pendidikan masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun bahan operasional dan fasilitasi kesetaraan dan pendidikan masyarakat.

U. Seksi kursus dan kelembagaan masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun bahan operasional dan fasilitasi kursus dan kelembagaan.

1.6 Sarana dan Prasarana

1.6.1 Sarana Dinas Pendidikan Dan Provonsi Jawa Barat

Dinas pendidikan provinsi jawab barat memiliki sarana unuk menunjang aktifitas pekerjaan pegawai. Dinas pendidikan provinsi jawa barata berada di jalan Dr. Radjiman No.6 adapun saranayang di miliki dinas pendidikan jawa barat pada tahun 2011-2012 antara lain :

1. Memiliki gedung/kantor sebnayak 3 bangunan
2. Memiliki fasilitas lapangan upacara
3. Memiliki fasilitas lapangan parkir motor dan mobil
4. Memiliki mesjid baitush sholihin
5. Memiliki fasilitas olahraga tennis outdoor 2 lapang
6. Memiliki ruangan kesenian daerah

7. Memiliki ruangan kantin pegawai
8. Memiliki ruang rapat (humas dan hukum)

1.6.2 Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Prasarana yang di miliki oleh bagian humas dapat di lihat di dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Fasilitas Kerja yang digunakan oleh bagian Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

No	Nama Sarana & Prasarana kerja	Jumlah	Satuan	Penempatan
1	Lemari besi 2 pintu	4	Unit	Humas
2	Laci besi	2	Unit	Humas
3	Meja kerja	8	Unit	Humas
4	Kursi putar	7	Unit	Humas
5	Kursi lipat	6	Unit	Humas
6	AC	1	Unit	Humas
7	Dispenser	2	Unit	Humas
8	Mesin tik	1	Unit	Humas
9	Kamer	3	Unit	Humas
10	Handycam	1	Unit	Humas
11	Komputer/CPU	3	Unit	Humas

12	Monitor	3	Unit	Humas
13	Speaker	1	Unit	Humas
14	Printer	1	Unit	Humas
15	Pemotong kertas	1	Unit	Humas
16	Jam dinding	1	Unit	Humas
17	Cermin	1	Unit	Humas
18	Televisi	1	Unit	Humas
19	Gantungan surat kabar	1	Unit	Humas
20	Tempat sampah	1	Unit	Humas

Sumber: Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2013

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi PKL

Praktek kerja lapangan di lakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Dr. Radjiman No.6 Bandung Tlpn (022) 4264813, Fax (022) 4624881 , website www.disdik jabarprov .go.id

1.7.2 Waktu PKL

Penulis melakukan praktek kerja lapangan selam satu bulan,terhitung tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013. Setiap hari kerja dari hari senin sampai hari jumat dari pukul 07.30 WIB sampai selesai.